

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu jurusan yang berada di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Sesuai dengan tujuan FPTK, jurusan PKK bertujuan menghasilkan tenaga kependidikan dalam bidang kesejahteraan keluarga dengan berorientasi pada keterpaduan pendidikan akademis dan profesional. Dalam bidang kurikulumnya yang bersifat fleksibel, lulusan PKK tidak hanya diarahkan menjadi tenaga kependidikan saja tetapi diharapkan dapat bekerja di Industri bahkan mampu menciptakan lapangan kerja.

Guna mencapai tujuan tersebut, selain diberikan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Keguruan (MKDK), dan Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM), diberikan pula Mata Kuliah Bidang Study (MKBS) dan Mata Kuliah Pendalaman dan Perluasan (MKPP). MKPP bagi mahasiswa Jurusan PKK program studi Pendidikan Tata Boga terbagi menjadi 5 paket konsentrasi yaitu Manajemen Pariwisata, Manajemen Jasa Katering, Manajemen Jasa Patiseri, Manajemen Restoran, dan Manajemen Gizi dan Diet.

Pada paket Manajemen pariwisata terdiri dari mata kuliah Pengantar pariwisata, pelayanan prima, komunikasi bisnis pariwisata, Usaha Jasa Pariwisata, dan akomodasi pariwisata. Kurikulum Pendidikan Tata Boga jurusan PKK tahun 2006 mencantumkan mata kuliah Praktek Industri Pariwisata dengan bobot 3 SKS sebagai salah satu mata kuliah paket keahlian, dalam tingkatan kode kurikulum 4 artinya merupakan mata kuliah yang bersifat praktek tingkat tinggi dimana pelaksanaan praktek diharapkan bisa dilaksanakan di industri atau instansi nyata sebagai industri mitra pembelajaran.

Mata kuliah tersebut dinilai strategis agar bisa menjembatani tercapainya tujuan proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam Perguruan Tinggi khususnya yang terjadi di jurusan PKK FPTK UPI. Hasil belajar bagi mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan mereka dalam

menguasai kelompok mata kuliah untuk menguasai bidang keahlian yang dipilihnya sebagai bahan kajian akademis.

Melalui mata kuliah Praktek Industri Pariwisata mahasiswa dapat memahami konsep budaya kerja dan tuntutan keahlian tenaga kerja atau kompetensi yang dibutuhkan di Industri atau instansi yang bergerak dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima dengan baik yang bersifat jasa maupun yang bersifat produk barang. Pengalaman mengenal budaya bekerja dan wawasan dalam wacana di Industri atau Instansi Pariwisata bagi mahasiswa yang mengikutinya, merupakan masukan tambahan yang sangat berharga sebagai pengalaman belajar untuk komponen kemampuan akademik dan kemampuan profesi tenaga pendidik bidang tata boga dan kemampuan keterampilan bidang sosialisasi dalam kaitannya dengan *life skill*.

## **B. Tujuan Praktek Industri Pariwisata**

### **Tujuan umum praktek industri yaitu :**

1. Terjalannya kerjasama antara Prodi Pendidikan Tata Boga Jurusan PKK FPTK UPI dengan pihak perusahaan yang mengelola usaha industri dalam bidang pariwisata.
2. Meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam wacana industri Pariwisata bagi mahasiswa.
3. Meningkatkan proses belajar mengajar, keterampilan, dan etos kerja melalui praktek kerja industri.

### **Tujuan khususnya yaitu :**

1. Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan di divisi House Keeping Akomodasi Perhotelan baik hotel maupun non hotel.
2. Memiliki pengalaman melakukan “observasi partisipatif” dalam event organizer bidang perjalanan wisata.
3. Memiliki pengalaman dalam “event organizer” mengelola daerah tujuan wisata.

4. Memiliki pengalaman menjadi penyuluh dalam “observasi partisipatif” program penyuluhan lingkungan yang mendukung kenyamanan wisatawan di daerah tujuan wisata tertentu.

### **C. Manfaat Praktek Industri Pariwisata**

**Manfaat yang didapat dari praktek industri di Wisma Telkom adalah :**

1. Memiliki pengalaman belajar melakukan pekerjaan di divisi House Keeping Akomodasi Perhotelan baik hotel maupun non hotel.
2. Memiliki pengalaman belajar melakukan “observasi partisipatif” dalam event organizer bidang perjalanan wisata.
3. Memiliki pengalaman belajar dalam “observasi partisipatif” mengelola daerah tujuan wisata.
4. Memiliki pengalaman belajar menjadi penyuluh dalam “observasi partisipatif” program penyuluhan lingkungan yang mendukung kenyamanan wisatawan di daerah tujuan wisata tertentu.

### **D. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Tujuan Praktek Industri Pariwisata
- C. Manfaat Praktek Industri Pariwisata
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. LANDASAN TEORITIS**

- A. Pengertian Perusahaan
- B. Pengertian Usaha
- C. Pengertian Pengusaha
- D. Ruang Lingkup Usaha

E. Bentuk Hukum Perusahaan di Indonesia

### BAB III. HASIL PRAKTEK INDUSTRI PARIWISATA

A. Pelaksanaan Praktek

B. Sejarah Perusahaan

C. Klasifikasi Tenaga Kerja dan Jobs Description

D. Bentuk Perusahaan dan Sumber Modal Kerja

E. Aktifitas Perusahaan

### BAB IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perusahaan**

Hukum dagang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Istilah “perusahaan” baru kemudian timbulnya, sedangkan sebelum itu yang lazim ialah istilah “perdagangan”.

Telah diuraikan bahwa istilah “perdagangan” dalam KUHD dihapus, diganti dengan istilah “perusahaan”. Jika pengertian perdagangan dapat ditemukan dalam pasal-pasal 2 sampai 5 (lama) KUHD, sebaliknya pengertian “perusahaan” tidak terdapat dalam KUHD. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pembentuk undang-undang, tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan gerak langkah dalam lalu-lintas perusahaan sendiri. Terserah pada ilmiah dan jurisprudensi tentang perkembangan selanjutnya. Mengenai pengertian perusahaan ini dalam ilmiah terdapat beberapa pendapat, yang penting diantaranya ialah :

1. menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandle*” di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);
2. menurut Prof. Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”;
3. menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam *pembukuan*. Di sini Polak memandang perusahaan dari

sudut “komersil”. Sudut pandang ini adalah sama dengan Molengraff, tetapi unsur pengertian perusahaan adalah lain. Pengertian perusahaan menurut molengraff mempunyai enam unsur, sedangkan menurut Polak cukup dua unsur.

Kita mengetahui dalam masyarakat terdapat macam-macam perusahaan, yakni :

1. *Perusahaan Swasta*, yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah.

Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu :

- a. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia ;
  - b. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik warga Negara asing ;
  - c. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga negara asing ;
2. *Perusahaan Negara*, yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya milik Negara Indonesia. Mengenai jenis perusahaan ini juga ada bermacam-macam, yaitu :
    - a. *Perusahaan Negara berdasarkan IBW* (Indonesisch Bedrijven Wet, S. 1927 – 419 bsd S. 1936 – 445). Perusahaan ini tiap-tiap tahun mendapat pinjaman uang dengan bunga dari Pemerintah, misalnya DKA (Jawatan Kereta Api) dulu, dengan keuangan yang otonom. DKA ini selanjutnya menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api), yang dibentuk dengan PP No. 22 tahun 1963 (LN 1963 – 43), dan sekarang PNKA ini menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), yang dibentuk dengan PP No. 61 tahun 1971 (LN 1971 – 75).
    - b. *Perusahaan Negara berdasarkan ICW* (Indonesisch Compabiliteits Wet, S. 1925 – 448). Perusahaan Negara macam ini tidak mempunyai keuangan yang otonom (keuangan sendiri). Keuangannya merupakan bagian dari keuangan Negara pada umumnya, misalnya : Jawatan Pegadaian Negara. Perusahaan ini menjadi perusahaan Negara

berdasarkan PP No. 178 tahun 1961 (*LN 1961 - 209*), dan akhirnya menjadi perusahaan jawatan (Perjan Pegadaian) berdasarkan PP No. 7 tahun 1969 (*LN 1969 - 9*).

- c. *Perusahaan Negara berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yaitu Undang-undang No. 86 tahun 1958 (LN 1958 - 162) ;*
- d. *Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 prp tahun 1960 (LN 1960 - 59)*. Menurut Undang-Undang ini, yang disebut Perusahaan ialah perusahaan dengan bentuk apa saja, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang (pasal 1, *Undang-Undang No. 19 prp tahun 1960*).

## **B. Pengertian Usaha**

Kelompok Lapangan Usaha (KLU) merupakan daftar lapangan usaha di Indonesia yang saat menjadi acuan dalam pengajuan permohonan pendirian perseroan maupun perubahan perseroan. KLU dibuat oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **C. Pengertian Pengusaha**

Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Demikian definisi PKP berdasarkan Undang-undang KUP (UU Nomor 16 Tahun 2000).

Pengertian Pengusaha sendiri adalah adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan. Dengan kata

lain PKP adalah Pengusaha yang usahanya adalah memperdagangkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Apabila Pengusaha tersebut memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang yang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, maka Pengusaha tersebut adalah bukan Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, pengertian PKP ini juga dipersempit lagi. Walaupun Pengusaha tersebut menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak, tetapi kalau omzetnya dalam satu tahun masuk dalam katagori Pengusaha Kecil, maka dia bukanlah PKP kecuali Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau dalam satu tahun kurang dari jumlah yang ditetapkan. Batasan omzet Pengusaha Kecil ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### **D. Ruang Lingkup Usaha**

##### **Mengapa Usaha Kecil Perlu Dikembangkan?**

Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro & Abimanyu, 1995).

Dalam konstelasi inilah, perhatian untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah tangga (IKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, IKRT menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja

umumnya membuat banyak IKRT juga intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan IKRT akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di pedesaan (Simatupang et al., 1994; Kuncoro, 1996). Dari sisi kebijakan, IKRT jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di pedesaan, peran penting IKRT memberikan tambahan pendapatan (Sandee et al., 1994), merupakan seedbed bagi pengembangan industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi penduduk miskin (Weijland, 1999). Bisa dikatakan IKRT juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (survival strategy) di tengah krisis moneter.

Kedua, IKRT memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati peringkat kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. UKM (Usaha Kecil & Menengah) juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, namun kontribusi UKM jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi usaha besar (lihat Tabel 1). Pada UKM, penyumbang terbesar ekspor non-migas juga sektor industri pengolahan, terutama garmen, tekstil dan produk tekstil, dan sepatu.

Ketiga, struktur ekonomi Indonesia yang berbentuk piramida telah mencuatkan isu dualisme industri. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2006 yang dilakukan oleh BPS, dari total 22,7 juta perusahaan di Indonesia ternyata usaha mikro dan kecil mendominasi dari sisi unit usaha (99,1%) dan penyerapan tenaga kerja (84,4%), dengan perbandingan 2 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha mikro dan 3 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha kecil. Sebaliknya industri besar dan menengah, yang jumlah unit usahanya hanya 0,9%, menyerap 15,5% tenaga kerja dengan perbandingan 19 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha menengah, dan 108 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha besar. Pada dasar piramida didominasi oleh usaha skala menengah dan kecil yang beroperasi dalam iklim yang sangat kompetitif, hambatan masuk rendah, margin keuntungan rendah, dan tingkat drop-out tinggi. Struktur ekonomi bentuk piramida terbukti

telah mencuatkan isu konsentrasi dan konglomerasi, serta banyak dituding melestarikan dualisme perekonomian nasional.

#### **E. Badan Usaha di Indonesia**

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

##### **Jenis-jenis Badan Usaha :**

- **Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.

- **BUMN**

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

- **Perjan**

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: KAI (kini menjadi PT).

- **Perum**

Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah *profit oriented*. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi

Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (*go public*) dan statusnya diubah menjadi persero.

- **Persero**

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (PERSERO). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri PERSERO adalah:

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha PERSERO antara lain:

PT Garuda Indonesia Airways (PERSERO)

PT Angkasa Pura (PERSERO)

PT Pertamina (PERSERO)

PT Tambang Bukit Asam (PERSERO)

PT Aneka Tambang (PERSERO)

PT PELNI (PERSERO)

PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)

PT Pos Indonesia (PERSERO)

PT Kereta Api Indonesia (PERSERO)

PT Telkom (PERSERO)

- **BUMS**

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta. Berikut dijelaskan beberapa jenis BUMS yang ada di Indonesia.

- **Perusahaan Perorangan**

Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. Utang perusahaan berarti utang pemiliknya. Dengan demikian seluruh harta kekayaan si pemilik jadi jaminan perusahaan. Badan Usaha seperti ini tidak perlu berbadan hukum, walaupun jika ingin, boleh dilakukan.

**BAB III**  
**HASIL PRAKTEK INDUSTRI PARIWISATA**  
**DI PT. SANDHY PUTRA MAKMUR TCC TELKOM ( SPM )**

**A. Pelaksanaan Praktek**

Praktek Industri Pariwisata dilakukan pada :

Hari / Tanggal : 22 Mei – 6 Juni 2009

Waktu : 09.00 – 14.00

Tempat : PT. Sandhy Putra Makmur Widyaloka II dan  
Widyaloka III TCC Telkom  
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47 Bandung 40152

Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan praktek industri pariwisata di PT. Sandhy Putra Makmur ini diantaranya adalah untuk membantu mengerjakan proses berjalannya Front Office dan Housekeeping.

**B. Sejarah Perusahaan**

Pada tahun 1989 terbentuklah suatu proyek usaha yang bergerak dalam bidang trading, mechanical electrical ( ME ), jaringan kabel ( jarkab ), warung telekomunikasi ( wartel ) dan asrama.

Pada tahun 1992 proyek usaha tersebut berubah nama menjadi PT. Sandhy Putra Makmur, selanjutnya disingkat menjadi PT. SPM yang didirikan oleh darmawanita perusahaan PT. Telkom. Dengan kata lain PT. SPM merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom, salah seorang penegasnya adalah Ny. Tati Sundari Azmi dan Taratius Suprianta.

PT. SPM memiliki beberapa cabang diseluruh Indonesia, diantaranya cabang Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar sedangkan kantor pusatnnya bertempat di Jakarta.

PT. SPM cabang Bandung mempunyai bidang usaha antara lain : wartel, jarkab, ME, Trading dan Asrama. PT. SPM unit Telkom Training Centre selanjutnya disingkat menjadi TCC khusus mengelola bidang usaha asrama yang meliputi : akomodasi kamar, Food and Beverage termasuk kitchen, coffee break termasuk pastry, laundry, mechanical electrical, front office / front desk, security and cleaning service.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan Praktek Industri ( PI ) di PT. SPM Unit TCC yang memiliki usaha di bidang Front Office dan Housekeeping.



#### **D. Klasifikasi Tenaga Kerja dan Jobs Description**

1. Tugas dan Wewenang Manager.
  - a. Bertanggung jawab atas kemajuan dan kontinuitas perusahaan
  - b. Mengawasi kegiatan yang dilakukan perusahaan
  - c. Mengawasi kegiatan prosesing
  - d. Mewakili hubungan dengan pihak Telkom Training Centre ( TCC )
  - e. Mengevaluasi kinerja ekonomi perusahaan
2. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi
  - a. Membuat perencanaan atau program kerja untuk bidangnya masing – masing disesuaikan dengan program kerja departemennya secara efektif dan efisien.
  - b. Mengkoordinasikan pekerjaan yang ada dalam bidangnya dan mengadakan koordinasi dengan bidang – bidang yang lain yang ada dalam lingkungan kerjanya.
  - c. Membuat laporan secara periodik untuk masing – masing bidang dan bertanggung jawab kepada manager.
3. Tugas Wewenang Bagian Keuangan
  - a. Menyimpan dan mengamankan uang, cek, dan surat berharga lainnya serta menyimpan dan memelihara bukti – bukti keuangan dan harta kekayaan lainnya.
  - b. Melaksanakan pembayaran dan penerimaan uang dengan persetujuan pengurus / manager dengan memeriksa bukti – bukti keuangan yang akan dibayar sesuai dengan jumlah pembayarannya.
  - c. Membuat laporan keuangan secara periodik dan mempertanggungjawabkan kepada manager dan pihak – pihak yang memerlukannya.

#### **E. Bentuk Perusahaan dan Sumber Modal Kerja**

PT. SPM merupakan perusahaan yang berbentuk korporasi ( perseroan ). Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Kepemilikan dalam korporasi terbagi dalam lembar saham / sero PT. SPM menerbitkan saham – saham tersebut kepada perseorangan / perusahaan

lain yang kemudian menjadi pemilik atau pemegang saham. Pemegang saham pada akhir periode mendapatkan deviden ( bila mendapatkan keuntungan ).

Keunggulan utama perusahaan yang berbentuk korporasi adalah kemampuan untuk mendapatkan sejumlah besar sumber modal dengan menerbitkan saham. Karena itulah kebanyakan perusahaan yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk pengadaan peralatan dan fasilitas – fasilitasnya didirikan sebagai korporasi.

#### **F. Aktivitas Perusahaan**

PT. SPM unit TCC mempunyai bidang usaha yaitu :

a. Room Service ( Housekeeping )

Merupakan bidang usaha pengelolaan kamar untuk digunakan atau disewakan ke pelanggan, baik untuk kepentingan Telkom Training Centre ( TCC ) maupun untuk pelanggan non TCC atau masyarakat umum. Dalam hal ini PT. SPM mendapat sharing dari pendapatan sewa kamar kepada pelanggan dari TCC berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

b. Food & Beverage

Merupakan bidang usaha yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan atau penerimaan tamu / customer yang memerlukan informasi tentang semua aktivitas Telkom Training Centre yang meliputi informasi tentang penyewaan properti, informasi pelatihan dan informasi lain yang berkaitan dengan Telkom Training Centre.

c. Front Office

Merupakan bidang usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman ( restaurant ). Pesanan berdasarkan permintaan dari TCC maupun dari masyarakat umum.

d. Coffee Break termasuk Pastry

Merupakan bidang usaha yang bergerak dibidang usaha penyediaan akomodasi pastry, disini disediakan macam – macam kue untuk

dijadikan makanan selingan bagi tamu. Pesanan berdasarkan permintaan dari internal TCC maupun dari masyarakat umum.

e. Laundry

Merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bidang binatu (cuci pakaian). Laundry dikerjakan berdasarkan pesanan dari TCC.

f. Mechanical & Electrical ( ME )

Merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bidang pemeliharaan fasilitas fasilitas seperti : listrik, AC, air dan sarana – sarana lain yang mendukung fasilitas – fasilitas properti TCC.

g. Security

Merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bidang pengamanan sarana dan prasarana TCC.

h. Cleaning Service

Merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bidang jasa kebersihan, baik gedung maupun fasilitas – fasilitas yang ada di lingkungan TCC.

Adapun segmen pemasaran selama ini pemasaran ditujukan untuk konsumen, baik untuk TCC dan masyarakat umum. Selama ini kerja sama yang dibangun antara PT. SPM dan TCC dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan – kesepakatan yang telah disetujui di dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Setelah kita melaksanakan praktek industri di Wisma Telkom, banyak sekali pengalaman dan manfaat yang kita peroleh. Kita dapat mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya terjadi dan proses penerimaan tamu yang baik. Pelaksanaan praktek industri ini juga dilaksanakan untuk membekali diri kita menghadapi dunia kerja.

Selama kita melaksanakan praktek industri di Wisma Telkom, pada kenyataannya antara teori dengan penyelenggaraannya tidak sesuai, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu yang sangat mendesak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/08/pengertian-perusahaan.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/TELKOM>
- <http://www.telkom.co.id/tentang-telkom/visi-misi/>

## LAMPIRAN



Toilet



Wastafle



Lemari Baju



Kamar Mandi



Tempat Kunci



Meja Kerja



Kamar tidur Standar 2



Ruang santai VIP



Ruang santai standar 2



Receptionist



Kamar tidur VIP



Ruang tamu receptionist



Ruang tamu receptionist



Jendela Kamar



Kamar tidur standar 1